

**PELAKSANAAN POLITIK MERCUSUAR DI INDONESIA
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
TAHUN 1959-1965**

(SKRIPSI)

**Oleh
Neti Suzana**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**PELAKSANAAN POLITIK MERCUSUAR DI INDONESIA
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
TAHUN 1959-1965**

(ABSTRAK)

**Oleh
Neti Suzana**

Dekrit Presiden mengawali masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupakan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengertian terpimpin dalam demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden. Kondisi kacau di dalam negeri berdampak pada hubungan luar negeri Indonesia. Sejumlah masalah dengan negara seperti Belanda dan Malaysia terjadi. Demi meningkatkan gengsi dan eksistensinya Presiden Sukarno membentuk kelompok-kelompok negara yaitu Negara *New Emerging Force* (Nefo) dan *Old Established Force* (Oldefo). Pada masa ini politik luar negeri Indonesia di kenal dengan Politik Mercusuar. Politik Mercusuar pada dasarnya adalah politik dimana Indonesia menjadi pusat dari negara-negara yang sedang berkembang, dilaksanakan dengan cara pembangunan besar-besaran dalam negeri tanpa ada kontrol sosial yang menyebabkan munculnya sejumlah pertentangan karena dianggap kurang tepat melihat keadaan ekonomi saat itu sedang carut marut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari informasi, mengkaji dan menelaah lebih lanjut tentang pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik kepustakaan dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 dilaksanakan dengan 1) menggagas pembentukan Nefo dan Oldefo, 2) membentuk Conference of The New Emerging Forces (Conefo), 3) Politik Mercusuar dijadikan sebagai langkah revolusi fisik Indonesia, 4) membangun proyek-proyek spektakuler, dan 5) menyelenggarakan Games of the New Emerging Force (Ganefo)

**PELAKSANAAN POLITIK MERCUSUAR DI INDONESIA
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
TAHUN 1959-1965**

**Oleh
Neti Suzana**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN POLITIK MERCUSUAR DI
INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN TAHUN 1959-1965**

Nama Mahasiswa : **Neti Suzana**

No. Pokok Mahasiswa : **0643033027**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Jurusan : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

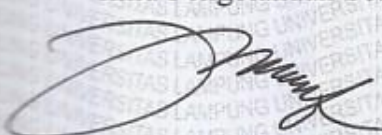

Drs. Maskun, M.H
NIP. 19591228 198503 1 005

Pembimbing II


Drs. Syaiful M, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 004

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial


Drs. Zulkarnain, M.Si
NIP. 19600111 198703 1 001

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah


Drs. Syaiful M, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 004

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Drs. Maskun, M.H

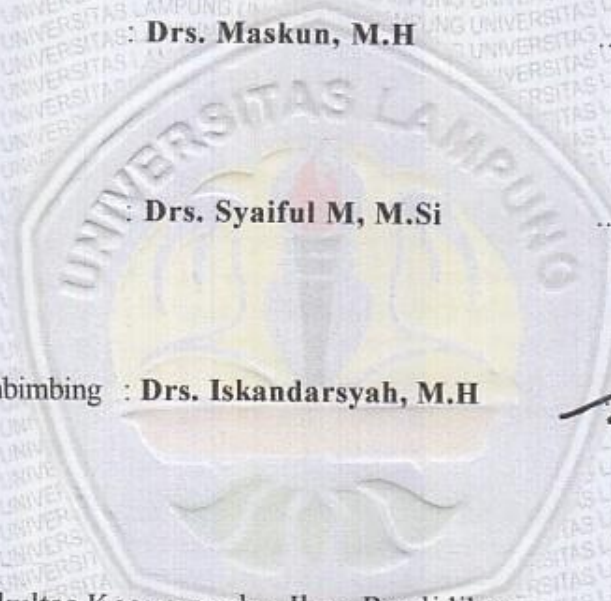
Sekretaris : Drs. Syaiful M, M.Si

**Penguji
Bukan Pembimbing : Drs. Iskandarsyah, M.H**

2. **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Dr. H. Muhammad Fadh, M.Hum
NIP.19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Juni 2016



UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 704624

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

1. Nama : Neti Suzana
2. NPM : 0643033027
3. Program Studi : Pendidikan Sejarah
4. Jurusan : Pendidikan IPS
5. Alamat : Pekon Sukabaru Ulu Krui Kecamatan Pesisir
Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *Pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965*, bukan hasil penjiplakan dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan kecurangan dalam pembuatan skripsi tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi (gelar akademik yang telah saya peroleh, bersedia untuk dicabut).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 3 Juli 2016
Penulis,




Neti Suzana
NPM: 0643033027

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pekon Sukabaru Ulu Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 27 September 1988, sebagai anak ke 3 dari pasangan Bapak Haidir Saukat dan Ibu Yuhanis.

Pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis adalah :

1. SDN 02 Cahaya Negeri Krui Kabupaten Pesisir Barat , selesai pada tahun 2000.
2. MTS NU Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat, selesai pada tahun 2003.
3. SMA Negeri 1 Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, selesai pada tahun 2006.

Pada tahun 2006 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada Tahun 2008 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), kemudian pada tahun 2010 penulis melaksanakan program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Arjuna Bandar Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, atas izin dan RidhoNya Kupersembahkan karya ini kepada :

Bak dan Mak tercinta dan Kubanggakan, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, bijaksana, kesabaran. Terimakasih atas kasih do'a, dukungan, dan pengorbanan demi keberhasilanku.

Yang tersayang kakak ku Wo Mera, Ngah Patmi serta adik-adik ku (Syukron, Riando dan Wilya) yang selalu memberikan motivasi dan Doa untukku.

Keponakan ku tersayang (Dimas Rizki Pratama)

Seseorang yang kusayangi yang senantiasa sabar menanti dan selalu memberikan Motivasi untuk keberhasilan ku.

Yang Terhormat Para Pendidik Terhebat yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan aku hingga aku berhasil

*Sahabat-sahabat tercinta
Dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan semangat*

Almamater tercinta, Universitas Lampung

Motto

*Aku tinggalkan Kekayaan alam Indonesia ,
biar semua negara besar di dunia iri dengan Indonesia,
dan aku tinggalkan hingga Bangsa Indonesia sendiri
yang mengolahnya.*

*Barangsiapa ingin mutiara,
harus berani terjun di lautan yang dalam..
Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah,
Perjuanganmu akan lebih sulit
karena melawan bangsamu sendiri.*

(SUKARNO)

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang Maha Berkehendak Atas Segala Sesuatu atas rahmat dan karunia yang senantiasa tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965*. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan yang baik sepanjang zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung,
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si., selaku Ketua Prodi Pendidikan Sejarah dan dosen pembimbing 2, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, kritik, saran, serta nasihat dalam proses kuliah dan proses penyelesaian skripsi;
7. Bapak Drs. Hi. Maskun, M.H, selaku dosen pembimbing I dan sekaligus Pembimbing Akademik penulis, yang telah bersedia untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasehat yang sangat berarti dan berguna untuk penulis.
8. Bapak Drs. Hi. Iskandar Syah, M.H, sebagai dosen pembahas utama terimakasih atas dukungan, masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Drs. Hi. Maskun, M.H., Drs. Syaiful M, M.Si, Drs. Hi. Ali Imran, M.Hum., Drs. Wakidi, M.Hum.,

Drs. Hi. Iskandar Syah, M.H., Drs. Tontowi Amsia, M.Si., Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum., M. Basri, S.Pd. M.Pd., Yustina Sri Ekwandari, S. Pd., M.Hum, Suparman Arif, S.Pd. M.Pd dan Myristica Imanita, S.Pd, M.Pd.

10. Rekan-rekan satu angkatan di Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan NR 2006, kakak tingkat dan adik tingkat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaan yang indah pada masa-masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis berharap semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan mereka kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum wr. wb.

Bandar Lampung, 3 Juni 2016
Penulis

Neti Suzana
NPM: 0643033027

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Analisa Masalah	10
B.1. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
C.1. Tujuan Penelitian	10
C.2. Kegunaan Penelitian	10
C.3. Ruang Lingkup Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Pustaka	13
A.1. Konsep Politik	13
A.2. Konsep Politik Luar Negeri	14
A.3. Konsep Politik Mercusuar	17
A.4. Konsep Pelaksanaan	19
A.5. Konsep Pelaksanaan Politik	20
A.6. Konsep Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965.....	21
B. Kerangka Pikir	23
C. Paradigma	24
III. METODE PENELITIAN	26
A. Metode Yang Digunakan	26
B. Variabel Penelitian	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
C.1. Teknik Kepustakaan	29
C.2. Teknik Dokumentasi	30
D. Teknik Analisis Data	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil	34
A.1. Latar Belakang Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia tahun 1959-1965.....	34

A.1.1. Kondisi Ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin	40
A.1.2. Kondisi Politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin	42
A.1.3. Kondisi Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin	47
A.2. Pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia tahun 1959-1965	49
A.2.1. Menggagas Pembentukan Nefo dan Oldefo.....	49
A.2.2. Membentuk Conference of The New Emerging Forces (Conefo)	51
A.2.3. Politik Mercusuar dijadikan sebagai Langkah Revolusi Fisik Indonesia	54
A.2.4. Membangun Proyek-proyek Spektakuler	57
A.2.5. Menyelenggarakan Games of the New Emerging Force (Ganefo)	62
B. Pembahasan	65
B.1. Pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia tahun 1959-1965	65
B.1.1. Menggagas Pembentukan Nefo dan Oldefo.....	65
B.1.2. Membentuk Conference of The New Emerging Forces (Conefo).....	66
B.1.3. Politik Mercusuar dijadikan sebagai Langkah Revolusi Fisik Indonesia	67
B.1.4. Membangun Proyek-proyek Spektakuler.....	68
B.1.5. Menyelenggarakan Games of the New Emerging Force (Ganefo)	69
V. SIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Gambar 1 : Ir. Sukarno Presiden Pertama Indonesia Penggagas Politik Mercusuar
- Gambar 2 : Pembukaan Games of the New Emerging Force (Ganefo) Oleh Presiden Sukarno Di Jakarta Tahun 1963
- Gambar 3 : Upacara Pembukaan Games of the New Emerging Force (Ganefo) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK)
- Gambar 4 : Salah Satu Artikel Berita Pelaksanaan Games of the New Emerging Force (Ganefo) Tahun 1963 yang dimuat salah satu surat kabar kabar di RRC
- Gambar 5 : Poster dan Logo Pelaksanaan Games of the New Emerging Force (Ganefo) di Jakarta Tahun 1963
- Gambar 6.A : Kedekatan Sukarno dengan Sejumlah Pemimpin Dunia Sukarno berbincang akrab dengan Presiden RRC Mao Zedong
- Gambar 6.B: Kedekatan Sukarno dengan Sejumlah Pemimpin Dunia Sukarno dan Perdana Menteri Uni Soviet (Rusia) Nikita Khrushchev pada 6 Oktober 1960
- Gambar 6.C: Kedekatan Sukarno dengan Sejumlah Pemimpin Dunia Sukarno dan Fidel Castro
- Gambar 7.A: Sejumlah Proyek Mercusuar yang di bangun pada masa Politik Mercusuar salah satunya Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK)
- Gambar 7.B: Proyek Spektakuler Hotel Indonesia yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan Ganefo, Tampak Gambar Hotel Indonesia Sekarang dan Hotel Indonesia Tahun 1963
- Gambar 7.C: Proyek Spektakuler Masjid Istiglal yang menjadi masjid terbesar dan termegah di Asia Tenggara
- Gambar 7.D: Proyek Spektakuler Monumen Nasional (Monas) Gambar menunjukkan Monas pada awal pembangunan dan Monas saat ini
- Gambar 7.E: Proyek Spektakuler Gedung Conefo (MPR) tampak proses awal pembangunan gedung yang terinspirasi dari sayap burung yang sedang terbang
- Gambar 7.F: Proyek Spektakuler Tugu Pancoran nampak bagaimana versi dulu dan sekarang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca dikumandangkannya Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno negeri ini sesungguhnya belumlah dapat dikatakan merdeka sepenuhnya. Sejarah mencatat pasca proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah besar mulai dari mempertahankan kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan itu sendiri. Sejumlah peristiwa penting terjadi pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang di percaya oleh rakyat untuk menjadi pemimpin saat itu.

Dinamika politik dalam negeri mewarnai kehidupan politik yang belum stabil dan masih seperti mencari jati diri bangsa. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang di catat sebagai perjalanan bersejarah bangsa ini. Sukarno menjelma menjadi tokoh penting yang menentukan arah perjuangan bangsa pasca menyatakan kemerdekaan. Banyak pemikiran pentingnya menjadikan negeri ini makin baik, namun tak jarang sejumlah kebijakannya dinilai tidak sesuai dengan tujuan luhur Bangsa Indonesia.

Bila kita berbicara nuansa perpolitikan pada masa Soekarno, sudah barang tentu kita harus membicarakan sosok besar sang proklamator. Dengan gaya dan

kemampuan retorikanyalah ia berhasil menunjukkan diri sebagai sosok yang dapat dijadikan harapan saat bangsa ini masih berada di bawah kungkungan penjajah. Sebagai seorang kepala negara, Soekarno berkesempatan membawa nuansa politik yang ada pada saat itu sesuai dengan yang ia kehendaki. Bernhard Dahm dalam “*Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*” menjelaskan bahwa :

memang sejak kecil Soekarno telah meresapi nilai-nilai kejawaan melalui hobinya menonton wayang kulit. Pemikiran Soekarno serta tindakan-tindakan politiknya yang tidak kenal kompromi terhadap kolonialisme dan imperialisme, tetapi selalu berusaha melakukan kompromi terhadap mereka yang segolongan dengannya, merupakan pengaruh dari cerita pewayangan yang suka dilihatnya sejak kecil, terutama sosok Bima. Pemikiran mitologis tradisional ini telah memberikan pengaruh normatif dalam perkembangan ideologi Soekarno selama masa kanak-kanaknya dan mungkin juga memberikan kecenderungan pada suatu sintesis politik Jawa yang tipikal (Bernhard Dahm,1987:29-31).

Pengaruh ini lambat laun mengkrystal menjadi bentuk embrio dasar-dasar pemikiran Soekarno yang cenderung melakukan sinkretisasi pemikiran. Dari cerita wayang dan kisah-kisah sejarah Jawa yang ia terima, Soekarno mengenal sosok Ratu Adil yang diramalkan oleh Jayabaya. Sosok inilah yang menjadi kunci perkembangan pemikiran Soekarno di masa kemudian.

Meskipun ia tidak pernah meyakinkan masyarakat bahwa dirinya sang *Mesiah* yang dijanjikan pada masa genting, tetapi segala tindakannya, desas-desus yang tersebar serta harapan yang dibebankan kepada dirinya ikut membentuk kepercayaan masyarakat bahwa ia memiliki kemampuan yang luar biasa.

Sebagai bentuk perwujudan itu, tidak heran jika pada tahun 1959 hingga 1966 Presiden Soekarno menetapkan bentuk pemerintahan negara dalam Demokrasi Terpimpin. Dia sebagai poros utama jalannya negara, merasa sah-sah saja jika

semua urusan negara ia yang kendalikan. Karena pada prinsipnya, begitulah konsep seorang raja yang memimpin rakyatnya pada masa lalu.

Kejayaan Nusantara di masa lalu saat bentuk pemerintahan yang ada adalah kerajaan dan kesultanan, sedikit banyaknya mempengaruhi pemikiran Soekarno bahwa untuk mencapai kejayaan negara yang baru merdeka itu harus berasal dari kepala satu orang yang cakap dan pandai dalam memimpin, dan tentunya masih keturunan dari raja-raja terdahulu.

Selain itu, apa yang digagasnya berupa Nasakom, adalah perwujudan dari nilai harmoni Jawa yang menyatukan berbagai keragaman yang ada hingga terbentuk suatu keseimbangan hidup. Bagi Soekarno, dengan menyatukan tiga ideologi besar pada masa itu tentunya akan lebih menjaga keamanan dan perdamaian di antara rakyat-rakyatnya. Soekarno adalah figur pemimpin politik yang hingga saat ini kharismanya masih sangat terasa pengaruhnya, khususnya ideologi marhaenismenya di Indonesia. Praktik politik dan konsepsi demokrasi terpimpin yang diterapkannya di Indonesia mampu memberikan warna lain dalam konsep demokrasi.

Soekarno dikenal dengan jiwa pemberontak, hal itu sebenarnya merupakan pengaruh dari perjalanan hidup dan karir politik pada masa itu yang selalu terjerat oleh bangsa asing yang datang dengan sikap imperialisme barat sehingga dalam pandangan Soekarno, setiap bangsa dan negara mempunyai jalan masing-masing dalam menentukan kemana arah dan tujuan bangsa dan negara tersebut, namun jika dalam penentuan arah dan tujuan bangsa dan negara tersebut dihalang-

halangi, maka sudah sepantasnya bangsa dan negara tersebut melawan dengan kekuatan penuh sebagai respon atas pengaruh itu.

Bagian terpenting dalam sejarah Soekarno dan Indonesia, terjadi pada saat Soekarno menerapkan suatu konsepsi tentang demokrasi terpimpin, yang dalam pandangannya adalah demokrasi Indonesia sejak zaman purbakala-mula ialah demokrasi terpimpin, dan ini adalah karakteristik bagi semua demokrasi-demokrasi asli di Benua Asia. Atas dasar itu, Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin sehingga mengakibatkan timbulnya suatu sistem otoriter, sebab kekuasaan terpusat dan dengan kekuasaan seperti itu, Soekarno melakukan tindakan nondemokratis, hingga akhirnya Soekarno digulingkan oleh berbagai elemen.

Salah satu elemen yang menjadi penyebab turunnya kepercayaan rakyat terhadap Sukarno adalah dengan di tetapkannya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin yang dilontarkan Presiden Soekarno pada bulan Februari 1957 berisi konsep demokrasi terpimpin yang hendak membawa PKI masuk ke dalam kabinet ini juga menyebut akan dibentuknya lembaga negara baru yang ekstra-konstitusional, yaitu (Dewan Nasional) yang akan diketuai oleh Soekarno sendiri, yang bertugas memberi nasehat kepada kabinet.

Maka untuk itu harus dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai termasuk PKI, serta dibentuk Dewan penasehat tertinggi dengan nama “Dewan Nasional” yang beranggotakan wakil-wakil seluruh golongan fungsional. Dewan ini diketuai oleh presiden, namun dalam praktiknya sehari-hari diserahkan kepada Roeslan Abdul Gani, walaupun Dewan Nasional ini tidak ada dasarnya dalam

konstitusi. Itu artinya Dewan Nasional ini tidak sejalan dengan konstitusi yang ada pada waktu itu.

Menjadi seorang tokoh sentral dalam kehidupan politik Indonesia tentunya menjadi tempat tarik menarik berbagai kepentingan. Sejak awal dimulainya Demokrasi Terpimpin, terjadi sebuah hubungan yang lebih dekat antara Sukarno dengan PKI. Sukarno memperlihatkan sikap yang melindungi partai tersebut dari permusuhannya dengan pihak tentara. Dalam hal hubungan antara Sukarno dan PKI ini terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Menurut Brackman :

Sukarno tidak bermaksud menempatkan PKI dalam kekuasaan. Dan ia merasa bahwa jika Sukarno tidak lagi di atas pentas, bukan satu kebetulan bila tentara dapat mengisi kekosongan itu. Menurut pandangan Van der Kroef, dengan taktik yang dilakukan oleh PKI yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan serta dapat memainkan kepercayaan rakyat akan datangnya masa depan yang lebih baik, maka dapat mengantarkan PKI pada posisi yang berkuasa. Sementara itu Herbert Feith juga pada kesimpulan yang serupa. Ia melukiskan kekuatan Sukarno-tentara-dan PKI sebagai kekuatan segitiga yang sedang terus bergeser dan berubah bentuk. Ada masa dimana Sukarno dan tentara menjadi unsur utama. Namun, di kemudian hari bisa saja Sukarno dengan PKI berada pada posisi yang utama dengan posisi tentara yang merosot (John D. Legge, 1985:369).

Dari berbagai pendapat tersebut dapat dilihat adanya suatu keterikatan tentara dan PKI dengan Sukarno. Keadaan yang terjadi selanjutnya tergantung dari Sukarno yang memainkan peran sentralnya didalam pemerintahan. Sukarno yang menyadari pentingnya dukungan dari kedua pihak ini berusaha untuk menekan keduanya, Ia tidak ingin tentara menjadi lebih dominan. Sementara itu, di sisi lain ia berusaha menekan PKI untuk tetap dalam kendalinya.

Berbeda dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer yang bebas dan aktif yang tidak memihak salah satu blok, baik Blok

Barat maupun Blok Timur, politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin terlihat lebih condong ke Timur. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Soekarno ini bersifat konfrontatif yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Politik luar negeri Indonesia juga menjadi lebih militan, dikarenakan saat itu Indonesia menentang keras adanya nekolim, yakni imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme.

Dalam masa pemerintahannya, Soekarno sebagai sosok yang kharismatik memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kebijakan terkait politik luar negeri Indonesia. Kebijakan Soekarno dalam politik luar negeri yang cenderung konfrontatif ini didasarkan pada dua faktor utama, yakni ideologi dan psikologi (http://fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-85102-studi-strategi-Indonesia-politik-luar-negeri-Indonesia-politik-luar-negeri-indonesia-pada-masa-Soekarno//selasa,11-des2015).

Dari segi ideologi, Soekarno menganut paham Neo-Marxis Leninis yang melihat pada sejarah kontemporer yang berisikan pertentangan antara negara kapitalis lama (Barat) dengan negara-negara yang baru muncul serta negara-negara sosialis baru. Sedangkan dalam segi psikologi, trauma akibat praktek imperialisme dan kolonialisme oleh negara-negara Barat yang begitu lama membuat Soekarno perlu untuk mencantumkan politik konfrontasi sebagai arah kebijakan politik luar negerinya.

Dalam menjalankan politik konfrontasinya, hal pertama yang dilakukan Soekarno adalah menyelesaikan masalah Irian Barat. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, masalah Irian Barat tak kunjung selesai. Irian Barat sebagai salah satu wilayah Indonesia yang seharusnya telah merdeka dari penjajahan Belanda tidak dapat merasakan kemerdekaan dari penjajahan tersebut. Hal ini dikarenakan sikap Belanda yang belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pada akhirnya pada bulan Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Belanda. Konfrontasi ekonomi dengan pelarangan beroperasi di Indonesia terhadap *Koninkijke Luchvaart Maatschappij* (KLM). Selain itu, perusahaan bersama Belanda dengan negara lain, dinasionalisasi menjadi perusahaan nasional-asing. Tindakan konfrontatif juga dilakukan dalam bentuk pelarangan peredaran publikasi dan media kantor Belanda “Aneta” di Indonesia. Selain konfrontasi ekonomi, tentara Indonesia memperkuat perseniataannya dengan membeli senjata dari Uni Soviet untuk melakukan operasi militer Trikora.

Operasi militer Trikora yang dilakukan Indonesia ke Irian Barat membuat timbulnya gejolak politik di kawasan negara-negara Asia, sehingga Amerika Serikat, Jepang, dan Australia mulai mendesak Belanda untuk melakukan perundingan dengan Indonesia. Atas desakan ini pula akhirnya Belanda bersedia menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa Belanda menyerahkan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat ke UNTEA, yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Untuk melakukan politik konfrontasinya, Soekarno membagi dunia ke dalam dua kubu. Pertama, kubu OLDEFO atau *Old Emerging Forces*, yaitu negara-negara yang menghambat kemajuan bangsa-bangsa yang sedang berkembang karena menganut paham imperialisme dan kolonialisme. Di sisi lain terdapat NEFO atau *New Emerging Forces*, yaitu negara-negara berkembang yang sedang berkembang dan negara-negara sosialis yang dianggap progresif, termasuk negara-negara yang baru merdeka dan negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Untuk

mewujudkan Nefo, maka dibentuklah poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang yang cenderung berkiblat ke Blok Timur.

Soekarno juga melakukan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena sejak berakhirnya Perang Dunia II Inggris telah berencana melakukan proses dekolonisasi secara damai dengan memberikan kemerdekaan bagi negara-negara jajahannya, termasuk Malaysia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini sangat bertentangan dengan politik konfrontasi Soekarno yang anti-kolonialisme dan imperialisme Barat. Sikap anti Barat (Belanda) dalam masalah Irian Barat berlanjut dengan sikap anti Barat (Inggris) dalam masalah pembentukan Federasi Malaysia.

Menurut Soekarno, hal ini membuktikan bahwa Malaysia merupakan alat yang dipergunakan Inggris untuk meletakkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Demikian hal ini dipandang sebagai Neo-kolonialisme oleh Soekarno. Untuk menyelesaikan kasus dengan Malaysia ini, Soekarno menggunakan strategi yang sama dengan caranya menyelesaikan masalah Irian Barat. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu konfrontasi politik, ekonomi, dan fisik (F.X Wawolangi, *Diplomasi Indonesia pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966*, Skripsi Universitas Indonesia, 200:26).

Konfrontasi politik yaitu dengan melakukan demonstrasi-demonstrasi di Kedutaan Besar Kerajaan Inggris di Jakarta dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Konfrontasi ekonomi yaitu Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan Inggris dan Malaya. Sedangkan konfrontasi fisik terhadap Malaysia dijalankan dengan pembentukan sukarelawan yang tergabung dalam Dwikora, yang isinya perhebat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunei untuk membubarkan Negara

Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia inilah yang pada akhirnya membuat Indonesia untuk memutuskan keluar dari PBB pada tanggal 1 Januari 1965.

Strategi lain yang dilakukan Soekarno dalam menjalankan politik luar negerinya adalah dengan Politik Mercusuar. Politik Mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Forces (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia.

Proyek-proyek besar dan spektakuler diselenggarakan dengan harapan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan Nefo. Proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah, di antaranya pembangunan jalan-jalan, hotel mewah, toko serba ada Sarinah, Jembatan Semanggi, Tugu Monas, dan diselenggarakannya Ganefo yang membutuhkan pembangunan Gelanggang Olahraga (Gelora) Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.

Politik Mercusuar ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan yang menganggapnya sebagai pemborosan uang negara. Apa yang menyebabkan Politik Mercusuar ini mendapat begitu banyak kecaman, dan bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965?. Melalui penelitian ini penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam tentang Pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965.

B. Analisis Masalah

B.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965?.

C. Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Agar penelitian memiliki arah yang jelas, maka setiap penelitian tentunya harus memiliki tujuan, yakni hasil akhir yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui tentang pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.
- 2) Untuk mendeskripsikan lebih lanjut pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

C.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai Sejarah Nasional Indonesia pasca Kemerdekaan tahun 1945.

2. Dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.
3. Sebagai suplemen materi pada mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia
4. Sebagai suplemen materi Sejarah Nasional kelas X semester ganjil pada materi Indonesia Pada Masa Orde Lama.
5. Sumbangan pemikiran dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sama (misalnya: Politik Indonesia pada masa Orde Baru).

C.3. Ruang Lingkup Penelitian

- 1) Subjek penelitian : Pemerintah RI pada masa Demokrasi Terpimpin
- 2) Objek penelitian : pelaksanaan Politik Mercusuar
- 3) Tempat penelitian : 1. Perpustakaan Universitas Lampung
2. Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung
- 4) Waktu penelitian : Tahun 2016
- 5) Bidang ilmu : Sejarah

REFERENSI

Dahm, Bernhard. 1987. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. LP3ES: Jakarta. Halaman 29-31.

Legge, John D. 1985. *Bung Karno Sebuah Biografi Politik*. Sinar Harapan: Jakarta. Halaman 369

[http://fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-85102-studi strategi Indonesia politik luar negeri Indonesia-politik luar negeri indonesia pada masa Soekarno//selasa, 11-des2015](http://fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-85102-studi_strategi_Indonesia_politik_luar_negeri_Indonesia-politik_luar_negeri_indonesia_pada_masa_Soekarno//selasa,11-des2015)

F.X Wawolangi, 2007, *Diplomasi Indonesia pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966*, Skripsi Universitas Indonesia: Depok. Halaman 26.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

A.1. Konsep Politik

Kata politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu “*polis* dan *teta*. Arti dari kata *polis* sendiri yaitu kota atau negara sedangkan untuk kata *teta* yaitu urusan. Sehingga hakikat politik itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu negara” (<http://wikipedia.com//pengertian politik//20 des 2015>).

Sehingga pengertian politik secara umum yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat.

Sejumlah ahli mengemukakan pandangannya mengenai apa itu politik : Aristoteles mengatakan bahwa “ politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”. Joice Mitchel mengatakan “politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya” (<http://wikipedia.com//pengertian politik menurut para ahli//20 des 2015>).

Roger F. Soltau lebih mendetail menjelaskan apa itu politik :

Menurut Roger politik adalah “bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu.

Menurutnya politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)” (<http://wikipedia.com//pengertian politik menurut para ahli//20 des 2015>).

Pendapat berbeda di kemukakan sejarawan Indonesia Miriam Budiardjo. Menurut Miriam Budiardjo, politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti plato dan aristoteles menyebutnya sebagai *en dam onia* atau *the good life* (kehidupan yang baik) (Miriam Budiardjo.1982:65).

Oleh karena itu secara garis besar definisi atau makna dari politik ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk negara sesuai *rules* agar kebahagiaan bersama di dalam masyarakat disebuah negara tersebut lebih mudah tercapai.

Dalam penelitian ini politik yang menjadi kajian lebih erat kaitannya dengan dengan politik luar negeri. Lalu seperti apa politik luar negeri itu sendiri berikut penjelelasan tentang konsep politik luar negeri.

A.2. Konsep Politik Luar Negeri

Secara umum, pengertian politik luar negeri adalah suatu perangkat yang formula, nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam menjalin sebuah kerja sama dengan

negara lain. Secara sederhana, pengertian politik luar negeri adalah cara negara dalam berinteraksi dengan negara lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa” (Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Luar Negeri RI.1997:11).

Pengertian politik luar negeri dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian politik luar negeri dalam arti luas dan sempit.

dalam arti luas, pengertian politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan kepada negara lain. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian politik luar negeri adalah strategi atau taktik yang digunakan dalam menjalin kerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang dilakukan biasanya dalam hal mengeluarkan doktrin, diplomatik, mencanangkan tujuan dalam waktu yang lama atau singkat dan membuat aliansi. (Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Luar Negeri RI.1997:17).

Sejumlah ahli mendefinisikan pengertian politik luar negeri antara lain :

Menurut definisi Hudson pengertian politik luar negeri adalah “sub-disiplin dari hubungan internasional tentang politik luar negeri untuk menjadi panduan bagi negara-negara lain yang ingin bersahabat dan bermusuhan dengan negara tersebut”. JR. Childs punya pendapat berbeda mengenai pengertian politik luar negeri menurut pendapat JR. Childs politik luar negeri adalah pokok-pokok hubungan luar negeri dari suatu negara dengan negara lain. Plano dan Olton punya pendapat yang berbeda. Menurut pendapat Plano dan Olton pengertian politik luar negeri adalah “strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang lainnya untuk mencapai tujuan nasional” (Leifer, Michael.1989: 12)

Jadi, kita dapat menyimpulkan apa sebenarnya tujuan dilakukan politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional.

Tujuan politik luar negeri tersebut menggambarkan tentang masa depan suatu negara yang diawali dari penetapan kebijakan dan keputusan yang didasarkan kepada kepentingan nasional.

Sejak proklamasi Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan internasional. Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia.

Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia. Setelah perubahan politik dunia yang terjadi begitu cepat Bangsa Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Sukarno seperti melakukan perubahan arah dalam politik luar negerinya. Munculnya sejumlah kekuatan baru yang berkelompok sesuai dengan kepentingan dan integritas negeri masing-masing membawa pengaruh terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tidak lagi bebas aktif.

Dibawah kepemimpinan sukarno indonesia mulai mengenal sejumlah negara penentang kekuatan liberal yang kebanyakan menganut paham komunis. Kedekatan bangsa indonesia dengan sejumlah negara komunis mempengaruhi arah politik luar negeri dari bangsa ini. Bahkan sejak di berlakukannya Demokrasi Terpimpin Sukarno menerapkan sebuah kebijakan baru untuk politik luar

negerinya yaitu Politik Mercusuar. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik mercusuar dan apa tujuannya, berikut penjelasannya.

A.3. Konsep Politik Mercusuar

Politik Mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi *New Emerging Forces* (kekuatan baru yang sedang tumbuh) di dunia. “Proyek-proyek besar dan spektakuler pun diselenggarakan dengan harapan agar Jakarta mendapat perhatian dari luar negeri dengan tujuan membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain” (<http://wikipedia.com//pengertian politik mercusuar//20 des 2015>).

Tidak ada penjelasan terbuka dari para ahli atau sejarawan Indonesia mengenai apa itu Politik Mercusuar. Dalam sebuah tulisannya mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia di peroleh sebuah pengertian mengenai Politik Mercusuar. Pengertian ini disampaikan oleh seorang pecinta sejarah bernama Galun Eka Radjasunu. Menurut nya yang dimaksud dengan Politik Mercusuar adalah :

“sebuah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan negara pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1960 yang bertujuan untuk memperlihatkan eksistensi Indonesia di kancah internasional. Pembangunan besar-besaran dalam negeri, persenjataan militer yang tangguh, menjadi Mercusuar atau pusat bagi negara-negara yang sedang berkembang atau NEFO, dan bagi Soekarno yang senang akan hal-hal simbolik dan secara psikologis untuk memuaskan kebutuhan untuk dihargai, menjadi pemimpin negara-negara NEFO merupakan inti dari kebijakan ini” (<http://kandangeilmu.blogspot.co.id20012/10/politikmercusuar.html//6 maret2016>).

Tujuan dari pelaksanaan Politik Mercusuar lebih erat kaitannya dengan apa yang di cita-citakan oleh Sukarno sebagai pencetus Politik Mercusuar. Yang antara lain sebagai berikut :

- 1) Politik Mercusuar bertujuan menjadikan Jakarta atau Indonesia sebagai mercusuar yang menerangi negara-negara yang sedang berkembang atau Nefo.
- 2) Politik Mercusuar menjadi jembatan untuk mengemukakan gagasan penggalangan kekuatan dari negara-negara yang baru merdeka, negara yang masih memperjuangkan kemerdekaan, negara-negara dari blok sosialis, dan negara-negara yang masih berkembang dalam suatu kelompok bernama The New Emerging Force (Nefo).
- 3) Melalui Politik Mercusuar kesenangan Presiden Sukarno akan sesuatu yang simbolik dapat terakomodasi ketika ia amat sangat bernafsu menjadi pemimpin Nefo, kebutuhan untuk dihargai dapat terpenuhi dengan munculnya Indonesia sebagai pemimpin yang dihormati di kawasan dan di panggung internasional.
- 4) Dengan Politik Mercusuar impian Presiden Sukarno untuk membuat proyek-proyek spektakuler akan terwujud. Pembangunan ini tak lain guna menunjukkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain dan semakin membuat posisi Indonesia di dunia international dapat diperhitungkan.

A.4. Konsep Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa : kata pelaksanaan memiliki kata dasar “laksana” mendapat awalan Pe sisipa a dan akhiran an. Laksana sendiri memiliki pengertian tanda yang baik, sifat, laku dan perbuatan. Kemudian untuk kata Pelaksanaan memiliki makna proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb) (Departemen Pendidikan Nasional.2008:903).

Sejumlah ahli juga mengemukakan pengertian pelaksanaan yaitu antara lain: menurut Westra pelaksanaan adalah “usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”. Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan pengertian pelaksanaan adalah “upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan” ([http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi//pelaksanaan menurut ahli//22-12-2015](http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi//pelaksanaan%20menurut%20ahli//22-12-2015)).

Jadi dapat disimpulkan bahwa makna kata pelaksanaan dalam penelitian ini adalah sebuah kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya, yang berkaitan erat dengan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

A.5. Konsep Pelaksanaan Politik

Pelaksanaan politik dapat dijelaskan sebagai sebuah cara atau metode dalam upaya atau usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dalam sebuah negara. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan politik ialah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek dalam upaya mewujudkan sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk negara (<http://kandangeilmu.blogspot.co.id/2012/politikmercusuar.html/Mar2016>).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan politik dalam penelitian ini adalah sebuah usaha atau kebijakan dalam upaya mewujudkan tatanan pemerintahan dan negara dalam usaha mewujudkan masyarakat yang hidup sejahtera dan damai.

A.6. Konsep Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1965, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap atau stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer atau Liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa Demokrasi Parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dampaknya dari penataan kehidupan politik yang menyimpang dari tujuan awal adalah demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden). Menurut Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia VI, di jelaskan bahwa terjadi sejumlah penyimpangan yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap UUD 1945 antara lain adalah :

1. Kedudukan Presiden

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

2. Pembentukan MPRS

Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk oleh presiden dengan syarat adalah Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.

3. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh

Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, sehingga lebih dikenal dengan Manipol Usdek (Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro. 1993:125-128).

Demokrasi Terpimpin di Indonesia berakhir ketika sejumlah gejolak di bidang politik tidak mampu diselesaikan oleh Sukarno. Munculnya sejumlah pemberontakan di daerah maupun masalah lain seperti masalah hubungan luar negeri yang terus memburuk dengan sejumlah negara seperti Belanda dan Malaysia. Puncaknya terjadi ketika sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965. Meskipun gerakan ini dapat cepat ditumpas oleh Suharto, namun peristiwa ini menandai akhir dari Demokrasi Terpimpin dan akhir dari kekuasaan Soekarno sebagai presiden yang efektif.

B. Kerangka Pikir

Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan UUD 1945. Dekrit Presiden mengawali masa Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupakan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengertian terpimpin dalam demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden. Pada masa ini terjadi sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme.

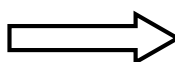
Kondisi kacau di dalam negeri berdampak pada hubungan luar negeri Indonesia. Sejumlah masalah dengan negara seperti Belanda dan Malaysia terjadi. Demi meningkatkan gengsi dan eksistensinya Presiden Sukarno membentuk kelompok-kelompok negara yaitu Negara *New Emeging Force* (Nefo) dan *Old Established Force* (Oldefo). Pada masa ini politik luar negeri Indonesia di kenal dengan Politik Mercusuar.

Politik Mercusuar pada dasarnya adalah politik dimana Indonesia menjadi pusat dari negara-negara yang sedang berkembang. Politik Mercusuar dilaksanakan dengan pembangunan secara besar-besaran dalam negeri tanpa adanya *social control*. Politik Mercusuar mendapat banyak pertentangan dari rakyat, lalu apa yang menyebabkan banyaknya pertentangan tersebut dan bagaimanakah pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965, kiranya itulah yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

C. Paradigma



Keterangan :

 = Garis Akibat

REFERENSI

<http://wikipedia.com//pengertian politik//20 des 2015>

<http://wikipedia.com//pengertian politik menurut para ahli//20 des 2015>

<http://wikipedia.com//pengertian politik luar negeri//20 des 2015>

Miriam Budiardjo.1982. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
Halaman 65

Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Luar Negeri RI, 1997.
Dokumen Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta:
Percetakan Deplu RI. 280 Halaman 11

Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Luar Negeri RI, 1997.
Dokumen Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta:
Percetakan Deplu RI. 280 Halaman 17

Leifer, Michael. 1989. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
Halaman 12

<http://wikipedia.com//pengertian politik mercusuar//20 des 2015>

<http://kandangeilmu.blogspot.co.id20012/10/politikmercusuar.html//6maret2016>

Departemen Pendidikan Nasional.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 903

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi//pelaksanaan menurut ahli//22-12-2015>

<http://kandangeilmu.blogspot.co.id/2012/politikmercusuar.html/maret2016>

Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro. 1993. *Sejarah
Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka Halaman 125-128

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Dalam suatu penelitian, metode merupakan faktor yang cukup penting untuk memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode Historis.

Menurut Husni Sayuti, metode adalah : dalam arti sesungguhnya, maka metode (Yunani=methods) adalah cara atau jalan. Sehubungan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang terjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin Sayuti, 1989 : 32). Metode historis menurut Hasan Usman yang dikutip oleh Basri adalah suatu periodeisasi ataupun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam suatu penelitian sehingga dengan kemampuan yang ada dapat dicapai hakikat sejarah yang hasilnya disampaikan kepada para ahli dan pembaca umum.

Menurut Nugroho Notosusanto, metode historis adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis dimaksudkan untuk memberi bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari hasil-hasilnya (Nugroho Notosusanto,1984: 10).

Menurut Hugiono yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses untuk mengkaji dan menguji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau serta menganalisisnya secara kritis (Hugiono, 1987:25). Lebih lanjut dikemukakan oleh Hugiono:

Yang dimaksud dengan istilah metode dalam arti metode sejarah hendaknya diartikan yang lebih luas, tidak hanya pelajaran mengenai analisis kritis saja melainkan juga meliputi usaha sintesa daripada data sejarah yang ada sehingga menjadi penyajian dan kisah sejarah yang dapat dipercaya. Metode sejarah bertujuan memastikan dan mengatakan kembali fakta masa lampau. Gejala-gejala social dan kebudayaan merupakan lapangan kerja dari metode ini. Akan tetapi tidak semua fakta dari kehidupan manusia dapat dimasukkan dalam sejarah (Hugiono, 1987:25).

Langkah-langkah dalam penelitian histories:

1. Heuristik yaitu kegiatan yang menghimpun jejak-jejak masa lampau
2. Kritik yaitu penyelidikan apakah jejak-jejak masa lampau itu asli baik isi maupun bentuknya
3. Interpretasi yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh itu
4. Historiografi yaitu menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah (Nugroho Notosusanto, 1984:36).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Heuristik : Istilah heuristic berasal dari bahasa Yunani “Heuricain” yang berarti mencari (Hugiono, 1987:30). Dalam bahasa Inggris “To Find” yang berarti tidak hanya menemukan tetapi juga mencari dulu baru menemukan (Nugroho Notosusanto, 1987:11). Langkah ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dan keterangan luasnya mengenai subyeknya yang diteliti yaitu sumber-sumber yang asli yang berhubungan dengan Politik Mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.
2. Kritik : Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengujian atas kritik. Kritik sejarah dibagi dalam kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern yaitu kritik yang dapat dilihat asli atau tidak sebuah sumber sedangkan kritik intern yaitu kritik yang tujuannya untuk mengetahui tentang kebenaran isi dari sumber yang didapat.

3. Interpretasi : Tahap selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran. Setelah diperoleh data-data yang cukup mengenai pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah penafsiran terhadap data-data sejarah yang berkaitan dengan pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis sehingga menjadi suatu urutan peristiwa yang saling berkaitan dan masuk akal.
4. Historiografi : Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah suatu penyusunan atau penulisan dalam bentuk laporan sehingga tersusun konsep sejarah yang sistematis, menarik, dan mudah dibaca yang berkaitan dengan pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 (Nugroho Notosusanto,1984:36)

B. Variabel Penelitian

Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena apa yang hendak diteliti. Melalui kajian pustaka-pustaka konsep tersebut dipaparkan dan dijelaskan pengertiannya. Dengan demikian agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, mereka harus mengoperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel yang akan berarti sesuatu yang mempunyai nilai variasi.

Menurut Suharsimi Arikunto variabel adalah obyek penelitian atau apa saja yang menjadi inti perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1991 : 91). Variabel dalam pengertian umum adalah suatu konsep yang diberi nilai. Variabel dalam suatu penelitian adalah hal yang utama karena variabel adalah suatu konsep yang digunakan dalam suatu penelitian.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud variabel adalah obyek yang mempunyai nilai dan menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal

dengan fokus penelitian yaitu Pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan lebih akurat. Teknik pendukung dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

C.1. Teknik Kepustakaan

Menurut Koenjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan misalkan koran, majalah, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koenjaraningrat, 1997:8).

Sedangkan menurut Hadari Nawawi, teknik studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Hadari Nawawi, (1993:133).

Terdapat empat ciri utama dalam studi kepustakaan yakni :

- 1) Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau angka bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian-kejadian atau benda-benda lainnya.
- 2) Data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak pergi kemana-mana melainkan berhadapan langsung dengan sumber yang telah ada
- 3) Data pustaka umumnya adalah data sekunder
- 4) Kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu.
(Hadari Nawawi, (1993:134)

Jadi teknik kepastakaan adalah suatu teknik yang mempelajari dan memahami literature atau buku-buku yang memperoleh data-data berupa teori-teori atau argumen-argumen yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik kepastakaan di lakukan peneliti untuk mencari dan mengkaji berbagai buku yang berisi literatur tentang objek penelitian yaitu pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

C.2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik mencari data mengenai hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, agenda atau yang lainnya, (Suharsimi Arikunto, 1991:188).

Teknik dokumentasi yang digunakan untuk dapat menelaah dan mempelajari informasi-informasi, data-data, arsip dan berkas tersebut untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

D. Teknik Analisis Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif , dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yang berupa fenomena-fenomena dan kasus-kasus dalam bentuk laporan dan karangan para sejarawan, sehingga memerlukan pemikiran yang teliti dalam menyelesaikan masalah penelitian. Menurut Koenjaraningrat teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini karena data yang dikumpulkan

bersifat monografi atau kasus-kasus dan tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak dapat diuji secara statistik (Koenjaraningrat, 1997:338).

Teknik analisis data merupakan suatu tehnik yang mengelompokkan, membuat suatu manipulasi serta menyikat data sehingga mudah dicerna. Dalam mengadakan analisis data yang perlu diingat bahwa data yang diperoleh hanya menambah keterangan terhadap masalah yang ingin dipecahkan dan informasi merupakan data yang dapat menjawab sebagian ataupun dari masalah yang hendak diteliti.

Dengan analisis kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti guna mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kondisi. Berkenaan dengan analisis data kualitatif, Farida Yusuf Tayibnipas mengartikan bahwa analisis data kualitatif yaitu: “mengambil catatan tentang kejadian penting dilapangan, menghubungkan dengan kejadian lain, fenomena, teori dan menulisnya sehingga orang lain dapat melihat secara umum, universal dalam kenyataan tentang hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhannya”.

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Muhammad Ali yakni:

1. Penyusunan data, digunakan untuk mempermudah dalam penelitian hal ini menyangkut apakah data yang dibutuhkan sudah memadai atau tidak perlu melakukan seleksi
2. Klasifikasi data, merupakan usaha penggolongan data berdasarkan kategori tertentu yang dibuat oleh peneliti yang berkaitan dengan

Pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

3. Pengolahan data, data-data yang telah dimasuk kemudian diolah dengan jalan menyaring dan mengatur apakah data-data tersebut dapat digunakan atau tidak
4. Penyimpulan data, setelah diadakan pengolahan data maka untuk langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan untuk kemudian disajikan dalam bentuk laporan sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya (Muhammad Ali, 1985 : 152).

REFERENSI

- Husin Sayuti. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Fajar Agung: Jakarta. Halaman 32.
- Nugroho Notosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Intidayu Press: Jakarta. Halaman 10.
- Hugiono, 1987, *Pengantar Ilmu Sejarah*, PT. Bina Aksara, Jakarta. halaman 25
- Hugiono, *Op. Cit.* Halaman 25
- Nugroho Notosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Intidayu Press: Jakarta. Halaman 36
- Hugiono, 1987, *Pengantar Ilmu Sejarah*, PT. Bina Aksara, Jakarta. halaman 30
- Nugroho Notosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Intidayu Press: Jakarta. Halaman 11
- Nugroho Notosusanto. *Op Cit.* Halaman 36
- Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. Halaman 91.
- Koentjaraningrat.1997. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta. Halaman 8.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 1993. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada Press: Yogyakarta. Halaman 133.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. *Op.Cit.* Halaman 134.
- Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. Halaman 118.
- Koentjaraningrat.1997. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta. Halaman 338.
- Muhammad Ali, 1985, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung. halaman 152

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian ini maka Pelaksanaan Politik Mercusuar pada masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Politik Mercusuar diawali dengan membentuk Nefo dan Oldefo yang bertujuan untuk menggolongkan beberapa negara dalam kelompok-kelompok tertentu yaitu kelompok Nefo sebagai blok negara komunis dan Oldefo sebagai kelompok negara Liberal dimana kemudian Indonesia lebih condong ke kelompok Nefo.
- 2) Membentuk Conference of The New Emerging Forces (Conefo) merupakan gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk menyaingi 2 kekuatan blok sebelumnya (Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat).
- 3) Politik Mercusuar sebagai tonggak pelaksanaan revolusi fisik karena proyek-proyek spektakuler dilaksanakan saat itu yakni meliputi Hotel Mulia, Stadion Utama Senayan serta stasiun Televisi Republik

Indonesia (TVRI), Gelanggang Olahraga bahkan sampai kompleks Conefo yang sekarang menjadi ruang anggota DPR.

- 4) Penyelenggaraan Games of the New Emerging Force (Ganefo) pada dasarnya sebagai pesta olahraga semacam Olimpiade atau Asian Games, dasarnya adalah semangat dan prinsip Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Dengan tujuan mempererat persahabatan antar negara yang termasuk *New Emerging Forces* melalui arena olahraga. Kesuksesan pelaksanaan Ganefo faktanya tidak hanya di bidang olahraga, melainkan juga berpengaruh dalam bidang politik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- 1) Kiranya seluruh rakyat Indonesia mampu mengilhami dan meneladani bagaimana usaha dan perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang tak kenal lelah untuk Indonesia dalam upaya menjadikan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bisa disejajarkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya yang lebih maju.
- 2) Meski terkesan pemborosan semua hal yang dilakukan dan dikerjakan pada masa pemberlakuan Politik Mercusuar tidaklah sia-sia. Lihatlah bagaimana seharusnya semua warisan dari masa itu bisa kita banggakan dan bisa menjadikan kita merasa tidak minder dengan negara-negara lain yang telah maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, H. Roeslan dalam Hugiono dan P.K Poerwantana, 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aboe Bakar Loebis. 1992. *Kilas Balik Revolusi; Kenangan, Pelaku dan Saksi* Jakarta: UI Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Luar Negeri RI, 1997. *Dokumen Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Jakarta: Percetakan Deplu RI.
- Baskara, T, Wardaya, SJ. 2008. *Indonesia Melawan Amerika, Konflik Perang Dingin, 1953-1963*. Yogyakarta: Galangpress.
- Basri MS. 2006. *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Restu Agung.
- Christianto Wibisono. 2007. *Dari Conefo ke Resolusi 1747*. Jakarta: Suara Pembaruan
- Dahm, Bernhard. 1987. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Helius Sjamsuddin. 1996. *Metodologi Historiografi Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- H.Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hugiono, 1987, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

- Joened, Marwati & Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VII*. Jakarta: Balai Pustaka Depdikbud
- Joko Subagyo, 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia
- Julius Pour. 2004. *Dari Gelora Ke Gelora*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kamisa. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Koestoro Budi dan Basrowi, 2006. *Strategi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Kampusina.
- Legge, John D. 1985. *Bung Karno Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Leifer, Michael. 1989. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Marshall Green. 1992. *Crisis and Transformation 1965-1968; Dari Sukarno Ke Soekarno*. Jakarta : PT Temprint.
- Miriam Budiardjo. 1982. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Muhammad Ali, 1985, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Nazir M, 1984. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notosusanto Nugroho. 1964. *Hakekat Sejarah dan Azas-azas Metode Sejarah*, Bandung: ISAB
- _____, 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* . Jakarta: Inti Indayu.
- _____, dan Marwati Djoened Poesponegoro. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka
- _____, dan Marwati Djoened Poesponegoro. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nurani Soyomukti. 2008. *Sukarno dan Nasakom*. Yogyakarta: Garasi

R.E Elson. 2008. *The Idea of Indonesia; Sejarah pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi.

Ricklefs, M.C. 2010. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi

Sunarti, Linda. 2009. *Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia 1957-1970 dari Konfrontasi Menuju Kerjasama*. Depok: Laporan Penelitian Universitas Indonesia.

Wawolangi, F.X. 2007. *Diplomasi Indonesia pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-196*. Skripsi Universitas Indonesia.

Web:

Alwi Shahab (2005). "Bung Karno dan Olahraga". Republika Online.

[http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi.definisi pelaksanaan](http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi.definisi_pelaksanaan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia//22-12-2015

<http://www.edukasi.net//Nazir M, Berbagai Konsep Sejarah,>// 22-12-2015

<http://www.edukasi.net//Purwantana, Beberapa Konsep Sejarah.>//02-8-2010

[http://fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-85102._studi_strategi indonesia politik luar negeri indonesia-politik luar negeri indonesia pada masa soekarno](http://fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-85102._studi_strategi_indonesia_politik_luar_negeri_indonesia-politik_luar_negeri_indonesia_pada_masa_soekarno)//selasa, 11-des 2015)

([http://wikipedia.com//pengertian politik](http://wikipedia.com//pengertian_politik)//20 des 2015)

([http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi//pelaksanaan menurut ahli](http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi//pelaksanaan_menurut_ahli)//22-12-2015

www.tpkfcsea.phpnet.us.

<http://kandangeilmu.blogspot.co.id/2012/politikmercusuar.html/maret2016>